

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Adi Bintang Risamtyo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Achmad

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

ADI BINTANG RISAMTYO. 2019. E0013012. THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE KARANGANYAR DISTRICT FOR EMPOWERMENT OF THE PEOPLE'S MARKET IN KARANGANYAR DISTRICT. Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta

This legal writing is to examine the role of the Karanganyar district government in market empowerment that can compete in the current era. In addition, it also examines the obstacles faced by the Karanganyar Regency Government in implementing good market empowerment. The main objective of the role of the Karanganyar Regency Government is as a facilitator in the participatory market empowerment process.

This legal research uses descriptive empirical juridical research, the source of legal material consists of primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used is related literature studies from print and internet media and field techniques that use interview methods.

Based on the research and discussion, it can be concluded that the role of the Karanganyar Regency Government in Empowerment Implementation that can compete in the current competition era in Karanganyar Regency is carried out as a facilitator of empowerment planning review in Karanganyar Regency and managing the budget that has been planned by the Karanganyar Regency Government. planning stage, implementation stage, monitoring and evaluation stage. The obstacles faced are First, lack of budget or funds. Second relocation of traders. Third, there are third parties who are not satisfied with the arrangement of the market. Fourth, the lack of competitiveness of the People's Market is compared to the Modern Market. Fifth, the draft regional regulation has not yet been passed. Sixth lack of human resources who master and understand about the people's market. The seventh is a bad stigma about the People's Market.

Keywords: Market, Karanganyar district, Empowerment People Market

ABSTRAK

ADI BINTANG RISAMTYO. 2019. E0013012. PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penulisan hukum ini untuk mengkaji peranan Pemerintah kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan pasar yang dapat bersaing di era sekarang. Di samping itu juga mengkaji tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pemberdayaan pasar yang baik. Tujuan utama dari peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai fasilitator dalam proses Pemberdayaan pasar yang partisipatif.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet dan teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Pelaksanaan Pemberdayaan yang dapat bersaing di era persaingan sekarang di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sebagai fasilitator pengaji perencanaan pemberdayaan di Kabupaten Karanganyar dan mengelola Anggaran yang sudah di rencana anggaran dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaannya diawali tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi. Hambatan yang dihadapi yakni Pertama, kurangnya anggaran atau dana. Kedua relokasi pedagang. Ketiga adanya pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan pasar. Keempat Kurangnya daya saing Pasar Rakyat di banding dengan Pasar Modern. Kelima belum di sahkannya rancangan peraturan daerah. Keenam Kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar rakyat. Ketujuh adanya stigma buruk tentang Pasar Rakyat.

Kata kunci: Pasar, Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Pasar Rakyat.

A. PENDAHULUAN

Peraturan menteri RI nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada

Pasal II ayat 1 disebutkan bahwa pasar tradisional sekarang telah berubah menjadi pasar rakyat. Melalui peranan strategis dan berbagai fungsi yang dimiliki oleh pasar rakyat menjadi salah satu wadah atau sarana untuk tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia, melalui peran dan fungsi tersebut pasar rakyat menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok pada masyarakat.

Perkembangan pasar di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pasar Modern dan Pasar Rakyat, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana saat ini bisa kita lihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki selera belanja multimode yang artinya dalam sesaat bisa berbelanja ke Pasar Rakyat dan sesaat kemudian berbelanja pada Pasar Modern. Bisa kita lihat bahwa Pasar Modern yang lebih bersih dan praktis membuat masyarakat lebih nyaman ketika berbelanja mengakibatkan tersingkirnya Pasar Rakyat pada saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian Indonesia semakin meningkat dan daya beli masyarakat juga semakin tinggi yang menciptakan prestige untuk membeli kebutuhan di tempat yang lebih modern, praktik dan nyaman. Hal tersebut yang memunculkan pasar modern yang sering kita kenal dengan sebutan mall, supermarket, shopping center, department store dengan munculnya pasar modern tersebut membuat keberadaan Pasar Rakyat tersingkirkan.

Hal tersebut dapat di lihat pada perkembangan pasar modern yang kian menjamur bertolak belakang dengan pasar rakyat yang sedikit demi sedikit mulai melemah dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda meningkat dalam segi jual beli di dalam tersebut itu semua disebabkan oleh sistem pengelolaan pasar rakyat yang salah, hal tersebut yang mengakibatkan pasar rakyat sangat susah berkembang di bandingkan pasar modern yang sistemnya sangat mudah untuk di kembangkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat di daerah tertentu. (Dr Mappamiring P., M.Si. 2018. 3:1)

Dalam batang tubuh UUD 1945 yang sudah diamandemen, Pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Mengenai Otonomi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam menyongsong perekonomian global/perekonomian bebas dimana sektor perdagangan mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam menumbuh kembangkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas ekonomi dimana salah satunya adalah aktivitas pasar. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar No. 99 Tahun 2016 di jelaskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengelola pasar rakyat yang ada di daerah tersebut, pada Undang – Undang 23 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, penataan dan pengembangan pasar dilaksanakan oleh kepala pengembangan pasar dibawah perintah seorang Kepala Dinas daerah atau kota. Kepala Dinas daerah atau kota menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam upaya pembagunan Pasar rakyat Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar sebagai mitra Pemerintah Daerah harus bisa memberikan peran dan fungsinya sebagai pengelola dan menumbuh kembangkan perekonomian di Kabupaten karanganyar melalui Pasar Rakyat. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada survey terakhir di Kabupaten Karanganyar terdapat 50 Pasar Rakyat dan 54 Pasar Modern yang terdiri dari mall dan supermarket.(<https://jateng.bps.go.id>) Dari banyaknya jumlah Pasar Rakyat di kabupaten karanganyar masih di butuhkan pengembangan, Pasar Rakyat yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana yang ada sehingga membuat masyarakat tetap nyaman saat berbelanja di Pasar Rakyat. Berdasarkan letak geografinya luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha² yang memiliki karakteristik umum daerah agraris dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Karanganyar digunakan sebagai lahan pertanian, tentu saja menurut data tersebut Pasar Rakyat yang mampu mendukung agar terlaksananya perekonomian yang baik.

Berdasarkan data dan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam keikut

sertaanya mengelola dan menjaga Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar dalam gerusan pasar bebas yang terjadi di saat ini dan apa saja hambatan yang di hadapi dalam mewujudkan Pasar Rakyat yang mampu bertahan dalam Era Globalisasi. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar?
2. Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Karanganyar dalam mewujudkan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang terkait baik dari media cetak maupun media internet dan teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu sebagai akselerator atau mempercepat di dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dengan cara meningkatkan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat. Berdasarkan wawancara lanjutan Dengan bapak Sriyanto selaku kabid Dagang di Dinas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 5 april 2019 mengatakan Dalam pemberdayaan pasar rakyat Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tahap-tahap dalam pemberdayaan Pasar yaitu :

a. Tahap Perencanaan

Sebelum melakukan pemberdayaan pasar rakyat tahap yang pertama adalah tahap perencanaan, dimana Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus menuangkan perencanaan pengembangan Pasar Rakyat ke dalam Perencanaan anggaran Tahunan dan akan di pleno dan disetujui oleh DPRD. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai

kegiatan terkait dengan semua kegiatan dinas yang bertujuan dengan pengembangan pasar rakyat di daerah kabupaten Karanganyar.

b. Tahap pelaksanaan

Setelah tahapan perencanaan selesai dan anggaran untuk tahun tersebut keluar, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan yang dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya pemberdayaan pasar.

c. Pemantauan dan evaluasi

Setelah tahapan pelaksanaan selesai Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan tahapan pemantauan dan evaluasi, di tahapan ini Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengevaluasi semua kegiatan yang telah di pantau dan di amati secara seksama, jika di nilai belum dapat mewujudkan pasar yang lebih baik dan nyaman untuk pengunjung atau konsumen, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan mengaji ulang dan memikirkan kegiatan lain agar terwujudnya pasar yang baik.

Contoh gambaran yang nyata yang telah di lakukan oleh Kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan Pasar rakyat di daerahnya melalui Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam hal ini Peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang di wakikan melalu Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat di ambil contoh dalam memberdayakan Pasar Rakyat Tawangmangu yang telah memenangkan gelar Pasar Teramah Se-jawa tengah di sini terlihat peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat Berperan penting dalam hal ini, Tahap-tahapan yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar Pasar tersebut Mendapat Penghargaan tersebut adalah:

1) Megupayakan masyarakat kembali untuk berbelanja di pasar rakyat

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan pola berfikir atau *mindset* terhadap masyarakat sekitar agar mau kembali berbelanja ke Pasar Rakyat.

2) Meyesuaikan Keadaan Pasar Rakyat dengan Perkembangan Zaman

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengupayakan agar Pasar Rakyat tidak tertinggal dengan

Perkembangan Zaman dimana Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melakukan Peremajaan Pasar.

- 3) Menyediakan fasilitas pasar rakyat yang memadai agar tidak kalah dengan pasar modern

Dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah memberikan fasilitas yang memadai seperti contohnya pos untuk menyusui anak, toilet yang bersih untuk memberikan daya Tarik terhadap pengunjung agar pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung ke pasar tradisional.

- 4) Pengelolaan limbah pasar

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan limbah sampah yang ada di pasar untuk di jadikan pupuk kompos dan juga disediakan tempat sampah organik dan anorganik untuk memudahkan pemilahan sampah dan juga menjaga kebersihan pasar agar tidak kumuh.

- 5) Pengadaan event yang menunjang

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengadakan event yang di danakan dari anggaran tahunan Dinas, untuk menarik pengunjung agar datang ke Pasar Rakyat.

2. Hambatan-hambatan yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam Memberdayakan Pasar Rakyat

Pelaksanaan pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar tak lepas dari peran dinas DISDAGNAKERKOP dan para pedang Pasar Rakyat itu sendiri, untuk dapat mewujudkan pengembangan Pasar Rakyat yang modern agar tidak kalah saing dengan Pasar Modern yang ada Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan banyak upaya untuk bisa mengembangkan Pasar Rakyat menjadi Pasar Modern dan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara benar.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar juga memiliki kendala. Dari hasil kajian yang telah penulis teliti telah menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh dinas DISDAGNAKERKOP. Untuk menjabarkan kendala yang dialami oleh

Dinas DISDAGNAKERKOP Kabupaten Karanganyar, penulis telah melakukan wawancara kepada Bapak SRI YANTO S.E. selaku Kepala Seksi Pengembangan Pasar pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 09.00 dan dilengkapi pada tanggal 5 Desember 2018 bahwa ada 7 kendala yang dihadapi.

a. Kurangnya Anggaran atau Dana

Dalam hal Pemberdayaan Pasar Rakyat tidak dapat lepas dari adanya anggaran atau dana yang besar, hal ini sangat penting agar terselenggaranya Pengembangan Pasar Rakyat yang baik dan dapat Bersaing dengan Pasar Modern saat ini, pada saat ini di kabupaten Karanganyar mendapat kucuran dana sebesar 3,5 Milyar Rupiah anggaran atau dana tersebut telah di gunakan untuk Renovasi 2 Pasar Rakyat yaitu Pasar Matesih dan Pasar Ngelano.

b. Relokasi Pedagang

Dalam Berjalananya Pemberdayaan Pasar Rakyat di perlukan ada nya Relokasi Pedagang yang berada atau berjualan di dalam pasar tersebut guna agar pedagang yang ada di pasar tersebut tidak merasa terganggu karena adanya Pemberdayaan atau Pembangunan yang sedang berlangsung, pedagang masih dapat melakukan kegiatan Jual beli di tempat yang sudah di siapkan oleh Pemerintah Daerah atau dinas terkait dengan Pengembangan Pasar tersebut, jadi tidak menimbulkan gejolak Perekonomian yang di karenakan oleh Pengembangan pasar tersebut

c. Pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan pasar.

Dalam Pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar DISDAGNAKERKOP melakukan penataan ulang para pedagang pasar yang akan menempati kios-kios baru yang diprioritaskan pada pedagang lama yang sudah memiliki ijin dan terdaftar pada pasar rakyat tersebut sebelum direnovasi, akan tetapi ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan penataan kios-kios yang dilakukan oleh DISDAGNAKERKOP, itu semua di karenakan posisi kios pihak ketiga atau pedagang yang belim memiliki ijin atau yang belum terdaftar tersebut berbeda dengan sebelumnya yang di anggap kurang strategis.

d. Kurangnya daya saing Pasar Rakyat di banding dengan Pasar Modern

Kurangnya daya saing Pasar Rakyat ini sangat jelas mencolok di sektor jumlah pengunjung yang datang untuk berbelanja di Pasar Rakyat di banding dengan Pasar modern yang hampir setiap saat ramai akan pengunjung,

hal ini terjadi di karenakan Pembeli merasakan kurang nyamannya lokasi atau keadaan Pasar Rakyat yang di nilai Kurang dan tidak nyaman untuk berbelanja lama di Pasar Rakyat tersebut.

e. Rancangan Peraturan Daerah yang belum juga di sahkan

Belum disahkannya Peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pasar di kabupaten Karanganyar membuat dinas terkait yang mengurus tentang pemberdayaan pasar rakyat belum bias mengambil keputusan yang tepat untuk memngembangkan pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Karanganyar, adapun Peraturan Bupati No 99 Tahun 2016 yang dirasa masih kurang di karenakan perda tersebut belum menjelaskan tentang pemberdayaan secara detail.

f. Kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar rakyat

Dengan kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar Rakyat membuat program pemerintah menjadi kurang tepat sasaran di karenakan SDM yang mendukung di harapan dapat menyerap aspirasi pedagang yang mengeluh tentang pasar tersebut

g. Adanya stigma buruk tentang Pasar Rakyat

Adanya stigma buruk tentang pasar yang membuat para konsumen pasar jadi enggan kembali ke pasar untuk berbelanja, stigma buruk ini sangat berpengaruh dalam aktivitas jual beli di pasar tersebut, sebagai contoh stigma buruk ialah stigma yang mencerminkan pasar tradisional itu kumuh, stigma buruk bahwa para pedagang di pasar berbuat curang, dan stigma buruk tentang adanya permainan harga komunitas barang tertentu yang membuat hilangnya aktivitas tawar menawar yang ada di Pasar Rakyat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peranan Pemerintah Derah Kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar

Peran utama Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbejaan Dan Toko Modern yakni penataan pasar rakyat yang bertujuan untuk menciptakan pasar rakyat

yang tertib, teratur, aman bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian dan menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam rangka memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam pelaksanaannya Disnakerkop telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai akselerator atau mempercepat di dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dengan cara meningkatkan pembangunan terhadap Pasar Rakyat, dalam pembangunan yang telah dilaksanakan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tiga tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan minitoring, dan tahap yang terakhir adalah evaluasi.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pemberdayaan Pasar Rakyat

Terdapat tujuh aspek hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberdayaan Pasar Rakyat di Kabupaten Karanganyar. Pertama, kurangnya anggaran atau dana. Kedua relokasi pedagang. Ketiga adanya pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan pasar. Keempat Kurangnya daya saing Pasar Rakyat di banding dengan Pasar Modern. Kelima belum di sahkannya rancangan peraturan daerah. Keenam Kurangnya SDM yang menguasai dan mengerti tentang Pasar rakyat. Ketujuh adanya *stigma* buruk tentang Pasar Rakyat.

Saran

1. Pengembangan Pasar Rakyat yang baik dan dapat bersaing dengan Pasar Modern saat ini tidak lepas dari anggaran atau dana untuk pembangunanya, akan tetapi dengan kurangnya dana dan anggaran membuat revitalisasi Pasar Rakyat hanya bisa dikerjakan di Pasar Nglano dan Pasar Matesih saja, maka penulis menyarankan agar pemerintah lebih memberikn perhtian khusus tentang pemberdayaan pasar Rakyat ini agar tidak kalah dengan Pasar modern yang saat ini lebih menarik dikunjungi pembeli karena tempatnya lebih bersih dan nyaman.
2. Meningat adanya pihak ketiga yang tidak puas dengan penataan dan relokasi pasar, maka penulis menyarankan harus adanya kerjasama yang baik antara pedangang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar juga dibutuhkannya

kesadaran dari pedagang untuk mengikuti dan mentaati peraturan dari Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus lebih giat lagi dalam mengembangkan, dan terus meningkatkan daya saing pembangunan Pasar Rakyat agar pengunjung merasa nyaman ketika datang ke Pasar Rakyat.
4. Diharap Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera mengesahkan raperda tentang pengembangan pasar di kabupaten Karanganyar agar dapat memudahkan instansi pemerintah yang menangani Pasar Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar & Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataran : Rajawali Pers.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Idris Amiruddin, 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta deepublish
- Moleong, Lexy.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remadja Rosdakarya.
- Prabawa, Utama. 1991. *Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Indonesia-Hill-Co.
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Jurnal

- Dr Mappamiring P., M.Si. 2018. "The Empowerment of Traditional Market Collaboration towards the Economic Independence of Small Traders in Indonesia". Vol. 3, No.9,

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Presiden RI Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah diatur mengenai dinas-dinas daerah Pasal 5 & 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2009

Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.

Internet

<http://www.karanganyarkab.go.id/20110107/geografi/> Diakses pada tanggal 04-09-2018 Pukul 13.15

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/10/997/banyaknya-pasar-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-pasar-di-jawa-tengah-tahun-2013.html> Diakses pada tanggal 04-09-2018 Pukul 13.30

<http://jdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/486-495.pdf> Diakses pada tanggal 04-09-2018 Pukul 14.00

www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-modern-dan-ciri-cirinya.html Diakses pada tanggal 14-09-2018 Pukul 21.00

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html> Diakses pada tanggal 14-09-2018 Pukul 21.53

Wawancara

Bapak Sriyanto selaku Kabid dagang di Dinas Dagang Tenaga Kerja Koperasi dan UKM